

***Religious Moderation Understanding of Islamic Education Teachers in
SMA/SMK/MA in Polewali Mandar Regency, West Sulawesi***

**Pemahaman Moderasi Beragama Guru Pendidikan Agama Islam Di
SMA/SMK/MA di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat**

Sabara

Badan Riset dan Inovasi Nasional
barackfilsafat@yahoo.co.id

Abstract

This paper aims to obtain a descriptive and ideographic description of the understanding of religious moderation among Islamic Religious Education (PAI) teachers at the senior high school (MA and SMA/SMK). Research problems include religious background, cases related to moderation, and patterns of understanding of religious moderation of PAI teachers. Religious moderation is described in three areas, namely understanding the diversity of religions and minority groups, the relationship between religion and the state, and the relationship between religion and culture. The research method is descriptive qualitative which makes the 25 PAI teachers as key informants who are interviewed in depth. The research location was in Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province. This study found that in general PAI teachers have traditional Islamic religious backgrounds, but have a low tendency of religious literacy, including literacy around religious moderation. There are two cases related to religious moderation in different contexts for PAI teachers. In the first case, a PAI MA teacher finally resigned as an ASN because he refused to salute the flag. Second, a non-ASN PAI MA teacher who is active in interfaith activities. In general, the pattern of understanding of religious moderation for PAI teachers (religion teachers) is relatively good, especially in terms of nationalism and culture. Relations in religious diversity need to be improved a little, especially with regard to understanding and tolerance towards adherents of other religions.

Keywords: *understanding; religious; moderation; teacher; west sulawesi*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan mendapatkan gambaran deskriptif dan ideografi mengenai pemahaman moderasi beragama di kalangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di tingkat MA dan SMA/SMK. Problem riset mencakup latar belakang keagamaan, kasus-kasus terkait moderasi, dan pola pemahaman moderasi beragama guru PAI. Moderasi beragama dijabarkan dalam tiga cakupan, yaitu pemahaman tentang keragaman agama dan kelompok minoritas, relasi agama dan negara, serta hubungan agama dan kebudayaan. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif yang menjadikan 25 guru PAI sebagai informan kunci yang diwawancara secara mendalam. Lokasi penelitian di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini menemukan umumnya guru PAI berlatar keagamaan Islam tradisional, namun memiliki kecenderungan literasi keagamaan yang rendah termasuk literasi seputar moderasi beragama. Terdapat dua kasus terkait moderasi beragama dalam konteks yang berbeda pada guru PAI. Kasus pertama, seorang guru PAI MA yang akhirnya mundur sebagai ASN karena menolak untuk hormat bendera. Kedua, seorang guru PAI MA

non ASN yang aktif dalam kegiatan-kegiatan lintas iman. Secara umum pola pemahaman moderasi beragama guru PAI relatif baik, utamanya dalam paham kebangsaan dan kebudayaan. Relasi dalam keragaman agama, sedikit perlu ditingkatkan, utamanya berkaitan dengan pemahaman dan sikap toleransi terhadap penganut agama lain.

Kata kunci: pemahaman; beragama; moderasi; guru; sulawesi barat

PENDAHULUAN

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan merupakan nilai universal dari inti sari agama yang mengajarkan harmoni pada seluruh sendi kehidupan dengan orientasi terwujudnya suasana rukun dalam kehidupan bersama yang bhineka. Konsep tersebut menjadi landasan bagi moderasi beragama (Sabara, 2020). Moderasi beragama yang diusung oleh Kemenag, (2019), merupakan perspektif, sikap dan perilaku sebagai jalan tengah di antara dua kutub ekstrem dalam beragama yang amat menekankan aspek kemanusiaan sebagai bagian esensial dari aspek doktrin dan hukum agama. Inilah yang disebut jalan tengah, karena agama dihayati dengan tanpa mempertentangkan doktrin teologis dan sosiologis (Qustulani et al., 2019). Secara paradigmatis, aksentuasi moderasi beragama adalah kesesuaian antara aspek substansial maupun formal agama (Sabara, 2020).

Buku Putih Moderasi Beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, (2019a), menyebutkan 4 indikator, yaitu; toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan serta sikap yang mengakomodasi kebudayaan lokal. Keempat indikator tersebut melalui penelitian ini dicoba untuk dieksplorasi pada pemahaman guru-guru yang mengampu mata pelajaran PAI yang mengajar di SMA/SMK/MA. Toleransi dan anti kekerasan diturunkan pada pemahaman seputar penyikapan mereka terhadap keragaman agama maupun suku, terutama pada kelompok minoritas, sikap terhadap pembangunan rumah ibadat penganut agama lain, relasi terhadap penganut agama lain,

termasuk dalam hal mengucapkan selamat hari raya. Komitmen kebangsaan dijabarkan pada opini mengenai Pancasila dan NKRI, wacana khilafah, negara Islam, serta penerapan syariat Islam, maupun perspektif mengenai upacara dan hormat bendera. Indikator akomodatif terhadap kebudayaan lokal digali pada pemahaman mengenai relasi Islam dan kebudayaan lokal dalam praktik keberagamaan masyarakat Muslim,

Toleran merupakan hasil dari sikap beragama yang moderat, toleransi adalah hasil dan moderasi sebagai proses. Seseorang yang moderat, boleh tak menyetujui tafsir kelompok tertentu mengenai ajaran agama, namun ketidaksetujuan tersebut tak berefek pada sikap menyalahkan orang lain yang berbeda pandangan dengannya secara terbuka. (Kementerian Agama RI, 2019b). Sikap toleransi aktif merupakan implementasi dari moderasi beragama, sebagaimana disebutkan Walzer, (1997), yaitu, menerima serta mengakui hak orang lain yang ditunjukkan dengan sikap mendukung, merawat, serta merayakan perbedaan. Toleransi aktif adalah sikap pro-eksistensi terhadap perbedaan yang mensyaratkan kerjasama yang aktif demi mencapai kebaikan yang dinikmati bersama (Osman, 2006).

Toleransi aktif terimplementasi dalam tiga relasi, yaitu relasi internal penganut agama, relasi antar penganut agama yang berbeda, serta relasi antar penganut agama dengan pemerintah (Agung, 2017). Intoleransi adalah sikap yang berkebalikan dari toleransi. Mulai dari stigma terhadap kelompok yang berbeda, sikap yang tidak

memberi ruang, ujaran kebencian, hingga mendukung cara-cara kekerasan atau pembubaran paksa terhadap kelompok keagamaan yang berbeda. Kaitannya dengan relasi agama dan pemerintah ditunjukkan dengan penolakan terhadap bentuk dan ideologi negara serta penolakan untuk menghormati simbol negara. Radikalisme agama berkelindan langsung dengan intoleransi. Radikalisme dalam konteks moderasi merupakan suatu paham atau ideologi yang hendak melakukan perubahan pada keseluruhan sistem sosial, budaya, maupun politik melalui penggunaan cara-cara kekerasan yang mengatasnamakan agama. (Kementerian Agama RI, 2019a). Pandangan radikalisme identik dengan kekerasan yang didasarkan pada pandangan yang sering menganjurkan kekerasan dalam keyakinan mereka (Nasution, 1995).

Radikalisme agama atau biasa disebut juga fundamentalisme agama adalah orang-orang yang secara sistematis dan konsisten menganut absolutisme, cenderung dikotomistik dan idealistik. Radikalisme menggunakan pendekatan non kompromis dalam pengertian tidak toleran kepada beragam perspektif serta keyakinan (Jainuri, 2016). Berkaitan dengan relasi kepada penganut agama lain, cara pandang radikal mengembangkan eksklusivisme teologis yang meyakini tidak ada jalan keselamatan di luar agamanya pada ranah sosiologis (Sumbulah, 2010). Eksklusivisme tersebut membuat kelompok radikal tak bisa bekerjasama dengan orang-orang dari agama lain, bahkan dengan orang-orang seagama yang berbeda kelompok/aliran dengannya. Eksklusivisme ini menyebabkan tidak diterimanya pemikiran dari luar dalam memahami agama (lihat Nata, 2001), termasuk diantaranya unsur kebudayaan lokal. Islam radikal merujuk pada ideologi keagamaan transnasional yang sengaja

dibawa masuk dan dikembangkan di Indonesia (Dja'far, 2018). Selain membawa misi pemurnian agama, ideologi radikal membawa misi sosio-kultur dan politik, sehingga radikalisme agama menjadi dediferensiasi secara kultural maupun struktural (Arif, 2010). Pemahaman keislaman berartikulasi pada dua model gerakan, yaitu gerakan kultural dan politik. Sebagai gerakan politik melahirkan gerakan revivalisme Islam yang berhasrat untuk mengembalikan kejayaan Islam melalui jalur politik. Kelompok ini mengkritik nasionalisme dan demokrasi serta menudingnya sebagai penyebab atas kemunduran dan keterbelakangan umat Islam (Rahmat, 2005). Sedangkan sebagai gerakan kultural, berpretensi pada pemurnian agama dari unsur-unsur tradisi lokal maupun asing yang dipandang sesat dan bid'ah.

METODE

Penelitian dilakukan selama 22 hari dengan 2 tahapan, yaitu studi awal selama tujuh hari (9-15 Agustus 2020) serta pengumpulan data lapangan selama 15 hari (27 Agustus-10 September 2020). Penelitian ini mengambil lokasi Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Sasaran utama penelitian adalah guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA/SMK serta guru mata pelajaran PAI di MA yang meliputi pelajaran Al-Qur'an-Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih dan Sejarah Kebudayaan Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklasifikasi pemahaman moderasi beragama guru PAI tersebut.

Guru PAI yang menjadi informan sebanyak 25 orang dengan beragam latar belakang. Kekuatan utama penelitian ini adalah wawancara mendalam kepada informan kunci. Wawancara secara mendalam yang dikembangkan dari instrumen pengumpulan data guna

menemukan konsepsi secara ideografis terkait pola pemahaman moderasi beragama dari masing-masing guru PAI. Demi melengkapi data, peneliti mewawancarai siswa MA/SMA/SMK Kepala SMA/SMK/MA, pengawas MA dan pengawas PAI SMA/SMK dari Kemenag, pengurus Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI), pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pejabat terkait di lingkungan Kemenag Kabupaten Polman, serta tokoh agama di Polman.

Selanjutnya, untuk observasi dilakukan dengan mengamati pembelajaran PAI secara daring terhadap beberapa guru. Peneliti juga berkesempatan melakukan observasi kegiatan supervisi yang dilakukan oleh salah seorang pengawas MA. Pengumpulan data dengan studi dokumen dilakukan terhadap buku ajar mata pelajaran PAI baik di SMA/SMK maupun MA, dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta data-data statistik terkait baik dari Kementerian Agama maupun BPS Kabupaten Polman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Lokasi dan Informan

Polman: Konteks Agama dan Kultur

Kabupaten Polman adalah kabupaten di Provinsi Sulbar yang berbatasan langsung dengan Sulsel. Berjarak + 195 Km dari Mamuju (ibukota Sulbar) dan + 250 Km dari Makassar (Ibukota Sulsel). Luas wilayah Polman adalah 2.022,3 Km² dan terbagi dalam 16 kecamatan. Menurut Poman dalam Angka 2018 (BPS, 2018), jumlah penduduk Polman sebanyak 427.484 jiwa dan dengan tingkat kepadatan penduduk 214 jiwa/Km². Etnis dominan adalah Suku Mandar, terdapat pula Suku Pattae di Kecamatan Binuang, Suku Bugis banyak bermukim di Kecamatan Polewali dan Suku Jawa yang umumnya bermukim di Kecamatan Wonomulyo. Kultur Mandar sangat dominan di wilayah Polman bagian barat sedangkan di wilayah Polman bagian timur cenderung lebih heterogen.

Penganut Islam di Polman menurut data BPS sebanyak 96,23%, penganut Kristen

2,76%, umat Katolik sebanyak 0,99% dan 0,02% penganut agama lainnya, umat Islam 100% pada sembilan dari 16 kecamatan di Polman. Rumah ibadat umat Islam terdiri atas 829 buah masjid dan 105 buah mushala, gereja Kristen dari berbagai denominasi sebanyak 47 buah dan gereja Katolik sebanyak 10 buah. Organisasi keislaman yang banyak berpengaruh di Polman adalah Darud Da'wah wal Irsyad (DDI), NU, Muhammadiyah serta Wahdah Islamiyah. Posisi ulama atau annangguru pada masyarakat Polman khususnya dan masyarakat Mandar pada umumnya memiliki peran sentral dan strategis. Sosok annangguru adalah pemimpin karismatik, yang berperan sebagai seorang pemimpin agama sekaligus tokoh masyarakat. Annangguru berposisi penting di tengah masyarakat Mandar yang dengan posisi tersebut menjadikan annangguru sebagai sumber rujukan, panutan sekaligus pelindung bagi masyarakat, Keluasan wawasan dan integritas moral semakin memperkuat posisinya di tengah masyarakat. Sentralisme posisi annangguru juga didukung oleh karakteristik masyarakat Mandar secara umum yang masih sangat religious (Musaddad, 2018).

Perkembangan Paham Keagamaan dan Pengaruhnya pada Guru

Mandar dikenal identik dengan pemahaman dan corak keislaman tradisional yang cukup kental. Di Polman bagian barat ada dua “titik” yang menjadi pusat studi keislaman tradisional, yaitu di Parappe Kecamatan Campalagian dan Pambusuang di Kecamatan Balanipa. Keduanya merupakan “pilar penyangga” dan “benteng” tradisionalisme Islam yang menjadi identitas khas masyarakat Muslim Mandar. Meski sama-sama bercorak Islam tradisional, keduanya memiliki perbedaan, di Campalagian, corak pembelajaran keislaman lebih menekankan pada aspek fikih, sedangkan di Pambusuang lebih ke arah tasawuf. Organisasi DDI juga menjadi salah

satu pilar tradisionalisme Islam di Polman melalui pendidikan formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi (IAI) Adapun kelompok Islam modernis seperti Muhammadiyah berkembang di daerah perkotaan yang menjadi pusat ekonomi seperti Wonomulyo dan Polewali.

Selama satu dekade terakhir, kelompok Islam yang bercorak Salafi-Wahabi mulai berkembang utamanya di kalangan kelas menengah utamanya kalangan ASN dan kepolisian. Di RSUD Polman dan Polres Polman berkembang kelompok Salafi yang berhaluan kepada Abu Firanda Andirja. Keberadaan kelompok ini kerap memicu resistensi dengan kelompok tradisional (NU). September 2019, kelompok tersebut yang jamaahnya banyak di Polres Polman berencana mendatangkan Firanda untuk memberikan ceramah di Polman. Rencana tersebut menuai resistensi dan penolakan dari kalangan NU, utamanya Pemuda Anshor yang membuat acara tabligh akbar Ustadz Firanda urung dilakukan. Selain kelompok Salafi, kelompok berhaluan Wahabi lainnya adalah Wahdah Islamiyah yang cukup berkembang utamanya di Polman bagian timur dan telah memiliki beberapa sekolah. Kelompok Syiah memiliki ratusan pengikut yang tersebar di berbagai kecamatan, namun kegiatan dan gerakannya tidak terlihat secara gamblang di masyarakat.

Perkembangan paham keagamaan tersebut cukup mempengaruhi paham keagamaan guru, termasuk guru PAI. Guru PAI yang berasal apalagi berlatar tradisi keislaman dari Campalagian maupun Pambusuang hampir dipastikan paham keagamaannya bercorak sangat tradisional. Berbeda jika guru yang bersangkutan berasal dari Polman bagian timur, kecenderungan paham keagamaan lebih tentatif, terutama jika yang bersangkutan berlatar pendidikan umum. Menurut Rasyidin, pengawas MA Kemenag Polman (Wawancara, 10/08/2020), situasi politik juga cukup mempengaruhi arah

dan kecenderungan pemahaman keagamaan pada sebagian guru. Menurut Rasyidin, klimaks dari situasi politik tersebut adalah momentum aksi seputar pilkada DKI (4/11 dan 2/12) dan pilpres 2019 cukup mempengaruhi emosi dan sentimen keagamaan sebagian guru yang berimplikasi pada polarisasi arah paham keagamaan mereka.

Profil dan Latar Belakang Keagamaan Guru-guru PAI

Penelitian ini mewawancarai 25 guru PAI yang terdiri atas 13 guru PAI di MA tujuh guru PAI SMA dan lima guru PAI SMK, 15 guru pria dan 10 guru wanita. Sebanyak 15 guru berstatus PNS serta 10 guru non PNS. Sebanyak 16 guru telah tersertifikasi dan sembilan lainnya belum tersertifikasi. Berdasarkan latar belakang pendidikan tujuh guru berkualifikasi S2 dan 18 guru berkualifikasi S1, dua guru berkualifikasi non Tarbiyah (Syariah) dan sisanya berkualifikasi sarjana pendidikan/Tarbiyah. Sebanyak sepuluh guru berlatar belakang pesantren, sepuluh guru berlatar pendidikan MA, dan lima orang berlatar pendidikan umum (SMA/SMK).

Dominan guru PAI yang berlatar belakang Islam tradisional (NU/DDI/tarekat) yaitu sebanyak 22 orang, namun yang aktif di organisasi atau badan otonom NU hanya 3 orang. Guru yang berlatar Muhammadiyah dua orang dan keduanya aktif sebagai pengurus, serta satu orang guru berlatar keagamaan Jamaah tabligh. Sebanyak 11 guru yang pernah aktif dalam organisasi kemahasiswaan selama kuliah, PMII enam orang, HMI empat orang, dan IMM satu orang. Sebanyak 17 orang aktif sebagai pengurus masjid/majelis taklim, namun hanya dua orang yang aktif sebagai dai. Latar belakang suku, 18 orang guru beretnis Mandar, empat Bugis, dua Jawa, dan satu orang beretnis Pattae.

Umumnya guru PAI yang diwawancarai terlihat tidak menunjukkan kecenderungan literasi keagamaan. Hanya

lima orang guru yang masih aktif mengakses bacaan atau referensi keagamaan terbaru, seperti karya Gus Dur, Nurcholish Madjid, Quraish Shihab, Nazaruddin Umar dan tokoh Islam moderat lainnya. Mengakses wawasan keagamaan melalui bahan bacaan dari internet hal yang juga jarang dilakukan oleh umumnya guru tersebut, Jika pun mengakses bacaan dari internet hanya terkait dengan materi pelajaran. Mengakses informasi keagamaan melalui internet umumnya dilakukan dengan menonton konten ceramah dari ustaz yang terkenal. Nama Adi Hidayat adalah nama yang paling banyak disebut sebagai orang yang paling sering didengar/ditonton ceramahnya serta diidolakan oleh umumnya guru PAI. Selain Adi Hidayat, nama Abdul Shamad dan Buya Yahya juga disebut oleh beberapa guru ketika ditanyakan ustaz siapa yang paling sering mendengarkan ceramahnya melalui internet. Berbeda halnya dengan lima orang guru yang memiliki kecenderungan literasi keagamaan, lebih memilih mendengarkan ceramah keagamaan melalui internet dari tokoh-tokoh seperti Quraish Shihab, Nazaruddin Umar, dan Buya Syakur yang juga merupakan sosok ulama kontemporer idola mereka.

Kasus-kasus Terkait Moderasi oleh Guru PAI

Seorang PNS Kemenag bernama Hakim pada tahun 2019 mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS. Hakim sebelumnya adalah guru mata pelajaran Al-Qur'an-Hadis yang bertugas di MAN I Polman. Menurut penuturan Marzuki, Kepala MAN I Polman (wawancara, 07/09/2020), awalnya Hakim memahami dan menjalankan Islam sebagaimana pada umumnya. Namun, sejak 2015 mulai terjadi perubahan, semenjak Hakim aktif mengikuti pengajian di salah satu kelompok Salafi. Beberapa waktu kemudian, paham dan sikap keberagamaan Hakim berubah drastis dan yang paling mencolok adalah keengganan dia untuk menghormati bendera merah-putih saat upacara. Meski dia ikut berdiri upacara

bendera sebagaimana guru lainnya beserta siswa setiap hari Senin, namun saat hormat bendera, ia tidak mengangkat tangannya. Menurut Hakim, sikap hormat terhadap bendera adalah syirik, karena kita hanya boleh hormat kepada Allah saja dan tidak kepada selainnya. Kepala MAN I dan Kemenag Polman, beberapa kali memanggil Hakim untuk dilakukan pembinaan, namun yang bersangkutan tidak bergeming dari pandangan dan sikapnya. Pihak Kemenag Polman kemudian memutuskan untuk memutasi Hakim ke sebuah MA Swasta sebagai bentuk sanksi, namun di tempat yang baru, dia juga tetap menunjukkan hal yang sama, enggan menghormat bendera. Kemenag Polman kemudian memutasi Hakim menjadi staf di Kantor Kemenag Polman dengan alasan demi pembinaan. Menurut beberapa sumber dari Kemenag Polman, setiap upacara Senin, Hakim masih tetap bersikap menolak hormat bendera, kerap kali Kepala Kemenag menyinggung hal tersebut dalam amanatnya selaku inspektur upacara. Pembinaan secara langsung kepada Hakim juga dilakukan, namun Hakim tetap kukuh pada sikapnya. Belum genap setahun Hakim bertugas sebagai staf di Kantor Kemenag, dia pun mengajukan pengunduran diri dengan alasan tidak terbiasa mengerjakan tugas-tugas administrasi.

Berkebalikan dengan kasus Hakim yang menunjukkan sikap keagamaan yang radikal. Seorang guru non PNS yang mengampu mata pelajaran Akidah-Akhlak di MAS Nuhayah Pambusuang bernama Subhan Saleh. cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan moderasi beragama. Bersama beberapa orang, Subhan mendirikan komunitas bernama Rumah Toleransi Sulbar (RTS). Sebuah komunitas yang concern pada isu-isu toleransi dan advokasi terhadap kelompok minoritas. Tahun 2018, RTS menyambut program dari Nurcholish Madjid Society (NMS) untuk melaksanakan kegiatan Sekolah Harmoni di Sulbar. Kegiatan yang diselenggarakan di Mamuju diikuti sekitaran

40 peserta dari beragam latar belakang kelompok agama di Sulbar. Tindak lanjut kegiatan tersebut selain dengan mengadakan *Training of Trainer* (ToT) bagi alumni Sekolah Harmoni yang juga masih bekerjasama dengan NMS dan Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina. Melalui jaringan alumni Sekolah Harmoni dan Rumah Toleransi, ubhan yang juga anggota Pemuda Anshor tersebut aktif dalam kegiatan-kegiatan lintas iman dan advokasi terhadap kelompok minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah di Sulbar. Menurut Ilham Sopo (wawancara, 05/09/2020), selaku kepala madrasah, dia sangat mendukung aktivitas moderasi beragama yang dilakukan oleh guru MAS Nuhiyah. Menurut Ilham, hal tersebut sesuai dengan visi-misi madrasah yang mengusung Islam Nusantara yang rahmatan lil alamin serta sejalan dengan agenda besar dari Kemenag.

Pola Pemahaman Moderasi Beragama Guru PAI

Pemahaman tentang Keragaman Agama serta Kelompok Minoritas

Secara umum pemahaman guru PAI tentang menerima dan menghargai keragaman agama maupun suku serta kelompok minoritas masih dalam konsep standar toleransi. Jawaban-jawaban yang dikemukakan atas pertanyaan ini masih terkesan normatif, yaitu selaku kewajiban sebagai seorang Muslim dan warga negara dalam menerima dan menghargai penganut agama lain. Penerimaan yang dimaksud lebih pada pandangan tentang relasi yang ko-eksisten dan tidak saling mengganggu. Ketika secara spesifik ditanyakan mengenai pendirian rumah ibadat, jawaban yang diajukan sudah mulai menunjukkan intensi yang berbeda dari setiap informan. Umumnya informan secara normatif menyatakan pendirian rumah ibadat harus sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu adanya umat penganut agama tersebut yang tinggal di sekitar rumah ibadat yang didirikan.

Beberapa informan dengan lugas menyatakan, jika pun ada penganut non Muslim yang tinggal di lingkungannya, namun secara pribadi mereka berharap tidak akan sampai ada pembangunan rumah ibadat agama lain di wilayah tempat tinggalnya tersebut. Ada rasa nyaman akan kondisi agama yang homogen pada sebagian informan dan keengganan mereka untuk berubahnya homogenitas agama di lingkungan atau daerah mereka.

Ada sebuah daerah di Polewali, yaitu Jalan Kartini di mana ada beberapa gereja (Kristen maupun Katolik) yang berdiri dengan jarak berdekatan. Kawasan tersebut merupakan daerah dengan populasi umat Kristiani terbesar di Polman. Beberapa gereja yang berdiri di kawasan tersebut pada dasarnya karena adanya beberapa denominasi gereja yang berbeda. Beberapa informan mempersoalkan banyaknya gereja yang saling berdekatan di kawasan tersebut, bahkan ada yang mencurigainya sebagai modus Kristenisasi. Seperti yang dituturkan AS, salah seorang guru PAI di salah satu SMA Negeri di Polewali (wawancara, 01/09/2020).

‘Kita perlu memperhatikan dan mewaspadai, bagaimana mungkin ada banyak gereja yang dibangun berdekatan Saya tidak setuju itu, dan terus-terang agak mencurigainya, jangan-jangan ada modus Kristenisasi dibalik banyaknya gereja yang dibangun di kawasan tersebut’.

Berkenaan dengan penerimaan pemimpin non Muslim baik sebagai kepala sekolah, kepala dinas, kepala daerah dan presiden, secara normatif umumnya guru PAI mengakui bahwa setiap warga Indonesia apa pun latar agamanya punya hak yang sama untuk menduduki jabatan pemimpin. Sebagai warga negara mereka menerima kesetaraan hak politik semua warga negara. Namun, sebagai seorang Muslim, tentu akan lebih memprioritaskan pemimpin yang seagama. Hal ini seperti dituturkan oleh MA, salah seorang guru PAI SMA (wawancara, 02/09/2020).

“Semua warga negara mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam hukum maupun politik. Latar belakang agama tidak bisa menjadi alasan untuk memarginalkan hak-hak tersebut. Namun, sebagai seorang Muslim, saya terikat oleh aturan agama saya yang mensyaratkan pemimpin dari satu agama dengan saya. Kecuali jika memang sudah terpilih atau dipilih sesuai dengan mekanisme, ya mau bagaimana lagi, harus diterima saja.”

Lingkungan tempat tinggal dan latar pendidikan agama serta lingkungan kerja di madrasah yang homogen membuat banyak guru PAI tidak memiliki relasi pertemanan dengan non Muslim. Secara normatif, umumnya mereka menjawab bahwa tidak ada persoalan berteman dengan penganut agama lain, selama tidak memasuki ranah akidah. Guru PAI di SMA/SMK memiliki relasi dengan non Muslim sebatas sebagai relasi sesama guru atau relasi dengan murid-murid sekolah yang “kebetulan” non Muslim. Peneliti mencatat hanya tiga orang guru yang memiliki relasi pertemanan yang dekat dengan penganut agama lain.

Berkenaan dengan ucapan selamat hari raya kepada penganut agama lain, semisal ucapan selamat hari Natal, informan terbagi dalam tiga pandangan dan sikap. Menganggap ucapan tersebut tidak boleh atau haram, menganggap ucapan tersebut boleh namun yang bersangkutan tidak mengucapkannya, serta berpandangan hal tersebut boleh diucapkan dan secara pribadi yang bersangkutan mengucapkan selamat setidaknya melalui media sosial. Guru PAI di SMA/SMK yang diwawancarai umumnya menyatakan mengucapkan selamat hari raya bagi penganut agama lain adalah terlarang karena sudah berkenaan dengan keyakinan. Sedikit berbeda dengan guru PAI di MA yang lebih banyak berpandangan bahwa mengucapkan selamat hari raya tersebut konteksnya adalah sosial bukan akidah, jadi boleh-boleh saja mengucapkannya. Sebagian dari mereka tidak mengucapkan meski berpandangan bahwa hal tersebut boleh lebih karena tidak memiliki teman atau kerabat.

Ada pula guru yang meski berpandangan mengucapkan selamat hari raya tidak dilarang, namun ia tidak melakukannya demi menghindari polemik dan menjaga perasaan orang yang mengharamkannya. Hamka, guru PAI SMAN 2 Polewali (wawancara, 12/08//2020) menyatakan,

“Secara pribadi saya tidak masalah dengan mengucapkan selamat Hari Natal misalnya, namun saya tidak mengucapkannya kepada rekan guru yang beragama Kristen di sekolah karena menjaga perasaan kawan yang berpandangan bahwa ucapan tersebut haram. Di media sosial saya juga tidak mengucapkannya, meski ada beberapa teman medsos saya Kristiani, demi menjaga polemik dengan sesama Muslim hanya karena persoalan ini.”

Seorang siswa SMA mengonfirmasi (wawancara, 02/09/2020), bahwa guru PAI di sekolahnya menekankan keharaman ucapan selamat hari raya agama lain semisal ucapan selamat Natal. Karena hal tersebut menyangkut prinsip akidah Islam, yang di mana umat Islam tidak boleh melanggarnya. Jawaban berbeda diberikan oleh Subhan Saleh, yang menyatakan bahwa ia secara proaktif dan terbuka mengucapkan selamat pada setiap hari raya agama lain.

“Meski saya tidak memiliki tetangga atau rekan kerja yang non Muslim, namun saya memiliki banyak teman penganut agama lain, dan di setiap hari raya, Natal, Paskah, Nyepi, Imlek, atau Waisak, saya memposting ucapan selamat hari raya tersebut dan mengirim pesan berupa ucapan selamat hari raya kepada rekan-rekan saya yang merayakannya baik melalui SMS maupun pesan WA. Bagi saya ini merupakan wujud komitmen akan kebhinekaan dan toleransi antar warga negara yang berbeda agama”.

Seluruh informan tidak menyetujui segala bentuk kekerasan atas nama agama yang dilakukan terhadap penganut agama lain, termasuk misalnya ujaran kebencian hingga penutupan paksa rumah ibadat penganut agama lain. Mereka berpendapat, jika ada persoalan terkait relasi antar agama, sebaiknya diselesaikan dengan jalan damai atau menggunakan jalan hukum jika ada perselisihan. Menurut mereka cara-cara teror

dan kekerasan justru hanya akan merusak citra Islam di mata umat lain. Ajaran Islam sebagai agama yang ramah dan penuh rahmat harus lebih ditonjolkan dalam menyikapi setiap masalah. Sebagai orang yang berada di bawah naungan negara hukum dan kekeluargaan, tentu pendekatan kekeluargaan dan hukum harus diutamakan. Salah seorang informan, Jaelani, guru PAI SMKN 1 Polewali (wawancara, 03/09/2020) menyatakan.

“Islam itu agama ramah, bukan agama marah. Islam sifatnya merangkul bukan memukul. Penggunaan cara kekerasan adalah jalan paling terakhir ketika semua jalan kekeluargaan dan damai buntu, namun sedapat mungkin dihindari. Indonesia adalah negara yang berasaskan kekeluargaan dan berdasarkan hukum dengan berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, jika ada persoalan dalam relasi dengan penganut agama lain, pendekatan kekeluargaan atau jika menemui jalan buntu, maka kembalikanlah ke jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan di negara ini.”

Seluruh informan berpandangan bahwa persoalan ikhtilaf atau perbedaan pendapat hingga keragaman organisasi di antara umat Islam adalah hal yang biasa dan perlu disikapi secara dewasa, sehingga perbedaan tersebut tidak membuat umat Islam saling berpecah. Namun, ketika secara spesifik ditanyakan pandangan mereka mengenai kelompok dalam Islam yang kerap dipandang sesat seperti Syiah dan Ahmadiyah, jawaban sebagian informan mulai berubah. Sebagian informan sepakat bahwa kelompok tersebut sesat, khususnya Ahmadiyah karena perbedaan yang tajam dalam doktrin pokok dengan Aswaja. Berkenaan dengan Syiah, umumnya guru PAI masih berpandangan bahwa Syiah adalah bagian dari Islam. Namun, ada beberapa yang secara tegas menyebut Syiah sebagai kelompok yang menyimpang dan sesat. Walaupun mereka memandang jika Syiah dan Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat namun tak sepakat dengan pembubaran kelompok tersebut oleh negara apalagi menggunakan pendekatan represif. Pendekatan dialog dan

pembinaan lebih dipandang sebagai jalan yang efektif untuk menyikapi keberadaan kelompok tersebut. Ada satu informan, guru PAI di salah satu SMAN (wawancara, 07/09/2020) yang menyetujui pembubaran oleh negara terhadap kelompok Syiah termasuk pembubaran paksa kegiatan keagamaan oleh kelompok Syiah dan Ahmadiyah.

Peneliti: “bagaimana pandangan Anda tentang kelompok Syiah dan Ahmadiyah?”

Guru; “menurut saya kelompok tersebut sesat bahkan keluar dari Islam karena keyakinan yang telah menyimpang jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya.”

Peneliti; “jika demikian, apakah anda setuju jika negara membubarkan kelompok-kelompok tersebut (Syiah dan Ahmadiyah)?.”

Guru; “ya setuju, memang harus dibubarkan daripada membawa keresahan.”

Peneliti: “jika kelompok Syiah atau Ahmadiyah melakukan kegiatan keagamaan, lantas ada sekelompok orang yang membubarkan secara paksa kegiatan tersebut, bagaimana menurut anda?.”

Guru: “saya setuju dengan kelompok yang melakukan pembubaran tersebut,”

Beberapa informan menyatakan memiliki relasi pertemanan bahkan keluarga dengan penganut Syiah. Diantara Kustianingsih, guru mata pelajaran Fikih/Ushul Fikih di MAN 2 Polman (wawancara, 12/08/2020).

“Beberapa keluarga suami saya di Pambusuang adalah tokoh dan penganut Syiah, hubungan dengan kami sampai hari ini masih baik-baik saja. Saya pribadi dan suami berafiliasi ke NU yang bermazhab Syafii, namun sepanjang interaksi dan pengamatan kami, tidak ada indikator yang bisa dijadikan ukuran untuk menyatakan bahwa Syiah adalah kelompok yang telah keluar dari Islam”.

Perbedaan suku tidak dianggap sebagai persoalan oleh semua informan. Interaksi antar suku di Polman, utamanya Mandar, Bugis, dan Jawa telah terjalin dengan baik sejak lama. Sentimen atau persoalan suku tidak pernah muncul baik di sekolah dan di lingkungan tempat tinggal. Sebaliknya, malah percampuran antar suku melalui perkawinan cukup jamak terjadi dan melahirkan beberapa

istilah, misalnya “Busman” (Bugis-Mandar) atau “Manja” (Mandar-Jawa). Sikap sentimen anti pada suku tertentu apalagi hingga melontarkan ujaran rasisme kepada suku tertentu, menurut mereka bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai keduanya sangat menekankan pendekatan persaudaraan dalam keragaman suku maupun budaya. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah merupakan ajaran Islam yang menekankan saling menghormati antar perbedaan suku dan etnik.

“Islam mengajarkan *li ta'arafu* atau saling kenal-mengenal dalam perbedaan suku maupun bangsa. Semua suku sama di hadapan Allah, sehingga tidak boleh kita menganggap suku kita lebih baik dari suku lainnya. Ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila menekankan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah, sehingga kita harus senantiasa saling menghormati meski berbeda suku. Di sini antar suku Mandar, Pattae, Bugis, Jawa atau lainnya terjalin hubungan dengan baik, bahkan hingga terjadi proses kawin-mawin antar suku yang melahirkan generasi “Busman” (Bugis-Mandar) atau “Manja” (Mandar-Jawa)”. (Hacerati, guru MA Ma'arif Qasimiyah, wawancara, 05/09/2020).

Pemahaman tentang Relasi Agama dan Negara

Seluruh guru PAI yang menjadi informan secara lugas menyatakan bentuk NKRI dengan berdasarkan Pancasila sebagai bentuk final bagi Indonesia. Semua informan menyepakati bahwa Pancasila telah sesuai dengan ajaran Islam, hingga tak mesti dipertentangkan lagi. Bentuk NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah bentuk ideal dari Indonesia yang bhineka, karena NKRI dan Pancasila mengakomodir semua warga negara dari berbagai latar agama dan sesuai dengan nilai serta ajaran Islam. Penekanan diberikan oleh beberapa guru mengenai penerapan Pancasila dan peraturan yang perlu konsisten, sehingga nilai luhur Pancasila dapat mengantarkan Indonesia ke dalam tatanan bernegara yang ideal.

Komitmen kebangsaan sebagai salah satu indikator moderasi beragama diterjemahkan dalam pertanyaan seputar

relasi agama (Islam) dan negara. Termasuk pandangan mereka tentang negara Islam maupun penerapan syariat Islam dalam kehidupan bernegara. Diantaranya adalah pertanyaan mengenai tanggapan mereka mengenai keinginan sekelompok umat Islam yang ingin mengembalikan Pancasila dalam versi Piagam Jakarta. Pancasila dalam versi Piagam Jakarta berisikan sila pertama dengan kalimat, “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kalimat ini kemudian diganti dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menjadi kalimat, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perjuangan mengembalikan Pancasila versi Piagam Jakarta biasa disebut juga perjuangan mengembalikan “delapan kata” dalam sila pertama Pancasila. Hampir semua informan tidak menyetujui upaya pengembalian Pancasila ke dalam versi Piagam Jakarta. Menurut mereka Pancasila adalah ideologi negara yang menaungi semua agama, bukan cuma umat Islam saja. Termasuk ketika ditanyakan seputar isu “NKRI Bersyariah” yang diusung oleh sejumlah umat Islam. Menurut sebagian besar dari guru PAI yang diwawancarai, konsep “NKRI Bersyariah” itu tidak sesuai dengan nilai dan spirit Pancasila yang menaungi semua penganut agama. Namun ada satu orang informan yang memberi jawaban berbeda dari yang lain seputar wacana ini, yaitu NS, guru PAI pada salah satu SMAN di Polewali (wawancara, 31/08/2020)

Peneliti: “menurut anda, apa bentuk NKRI yang berdasarkan Pancasila sudah final?”.

Guru: “ya, menurut saya sudah final”.

Peneliti: “bagaimana pandangan anda dengan keinginan sejumlah umat Islam yang ingin mengembalikan Pancasila kepada versi awal di Piagam Jakarta?”.

Guru: “Pancasila versi Piagam Jakarta, seperti apa itu?”.

Peneliti: “perbedaannya pada sila pertama, yang berbunyi, Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Guru: 'saya setuju, bila sila pertama tersebut dikembalikan seperti itu, supaya umat islam bisa menjalankan syariat islam.'

Peneliti: 'berarti anda setuju dengan usulan 'NKRI Bersyariah' dalam artian, aturan-aturan bernegara didasarkan dengan syariat Islam?'.

Guru: 'iya sebagai muslim kita harus setuju dengan penerapan syariat Islam, utamanya dalam kehidupan bernegara. Jika ada kesempatan untuk itu, kenapa tidak'.

Peneliti: "apakah menurut anda, ini tidak bertentangan dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika?".

Guru: 'saya pikir tidak, karena umat islam sebagai mayoritas, berhak untuk diatur dengan syariat Islam, dan penerapan syariat Islam bukan berarti umat agama lain akan didiskriminasi, bahkan melalui syariat Islam, mereka akan dilindungi.

Peneliti: 'lantas, bagaimana kalau sekalian Indonesia menjadi negara Islam saja/'.

Guru: 'saya rasa tidak perlu juga sejauh itu, cukuplah dengan Pancasila namun umat Islam diberi kesempatan dalam menerapkan syariat Islam'.

Peneliti: "jadi bentuk negara Indonesia yang ideal menurut anda/'.

Guru: 'tetap bentuk NKRI dengan dasar Pancasila, namun syariat Islam menjadi aturan dalam kehidupan bernegara'.

Ketika ditanyakan seputar isu negara Islam atau Khilafah Islamiyah dan perjuangan untuk menerapkannya di Indonesia, pandangan semua guru sepakat bahwa hal tersebut mustahil diperjuangkan. Jika pun dipaksakan hanya akan menuai potensi disintegrasi bangsa, karena penduduk Indonesia terdiri beragam agama, yang pasti penganut agama selain Islam tidak akan sepakat dengan negara Islam. Pernyataan Ma'ruf, guru PAI SMK Maarif Polewali (wawancara, 04.09.2020) dapat mewakili jawaban dari semua informan mengenai topik ini.

"Menurut saya, Islam tidak mengatur secara spesifik bentuk formal negara. adapun istilah khilafah atau daulah tak lebih hanya produk sejarah yang sudah tidak relevan lagi dengan zaman modern. Perjuangan mewujudkan Negara Islam atau Khilafah Islamiyah merupakan hal utopis di Indonesia, mengingat kenyataan masyarakat Indonesia yang

majemuk. Muslim indonesia saja belum tentu sepakat apalagi mereka yang beragama lain."

Bentuk NKRI yang berlandaskan Pancasila sebagai bentuk negara yang final dan ideal oleh sebagian guru PAI disampaikan kepada anak didiknya dalam materi pembelajaran yang terkait. Misalnya ketika membahas materi tentang jihad, cinta tanah air atau materi-materi lain yang terkait. Sebagai guru PAI, mereka menjelaskan kepada peserta didik mengenai pilihan ideal pada bentuk NKRI yang berdasarkan Pancasila dengan pendekatan yang normatif. NKRI berdasarkan Pancasila tidak lepas dari jasa para ulama yang juga pendiri bangsa. Kepada para siswa mereka menanamkan "doktrin" bahwa NKRI dan Pancasila adalah warisan ulama yang harus dijaga. Menurut salah seorang informan, "komitmen kepada agama berimplikasi pada komitmen terhadap negara".

Hal ini pula yang menjadi "pintu masuk" untuk menjelaskan kepada siswa mengenai pentingnya upacara dan menghormat kepada bendera, sebagai simbol menghormati perjuangan para pendahulu bangsa yang telah berkorban bagi kemerdekaan bangsa. Menghormat kepada bendera dipahami sebagai simbol bukan dalam pengertian memuja atau mengkhultuskan apalagi sampai menjadi perilaku syirik seperti yang "ditudingkan" oleh kelompok tertentu. Umumnya guru PAI menilai bahwa terlalu berlebihan dan salah paham jika menyatakan hormat bendera sebagai perilaku syirik. Karena pandangan kepada NKRI dan Pancasila sebagai bentuk yang ideal dan final, maka menurut guru PAI tersebut negara harus bertindak tegas kepada segala bentuk upaya merongrong integrasi bangsa. Gerakan separatisme atau pun pilihan meninggalkan Indonesia untuk bergabung dengan kelompok ISIS seperti yang dilakukan oleh sekelompok WNI, harus disikapi dengan tegas oleh pemerintah. Menurut mereka sikap tegas tersebut dimaksudkan sebagai cara

dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

Pandangan tentang Relasi Agama dan Kebudayaan

Masyarakat Muslim Mandar sangat dikenal sebagai masyarakat Muslim yang sangat kental dengan tradisi. Ekspresi berislam diwujudkan dalam beragam tradisi sebagai hasil dari perjumpaan Islam dan tradisi lokal Mandar. Semua informan memberikan apresiasi terhadap tradisi keberislaman masyarakat mandar yang berpadu dengan unsur-unsur kebudayaan lokal. Contoh tradisi islam lokal yang paling sering disebut adalah tradisi Sayyang Patudduq, yaitu tradisi ungkapan syukur masyarakat atas keberhasilan anak-anak yang mengkhataamkan Al-Qur'an 30 juz. Tradisi tersebut dilakukan dalam bentuk arakan keliling kampung, di mana anak-anak tersebut didudukkan di atas kuda yang menari mengikuti irama pengiringnya (parrawana). Tradisi tersebut menjadi motivasi bagi anak-anak di Suku Mandar untuk menamatkan bacaan Al-Qur'an.

Umumnya informan memberikan perspektif bahwa kebudayaan sebagai media syiar agama kepada masyarakat, sehingga agama mesti diletakkan dalam kerangka kebudayaan, dengan tetap memerhatikan prinsip dan ajaran Islam. Umumnya informan berpandangan agama sejatinya mengatasi kebudayaan, artinya posisi kebudayaan adalah sebagai media sedangkan agama sebagai substansinya. Agama (Islam) tetap harus mengakomodasi unsur kebudayaan lokal agar agama tetap hidup dalam tradisi keseharian masyarakat. Unsur kebudayaan lokal seperti lagu, tari, maupun musik dipandang oleh umumnya sebagai media menghidupkan syiar agama ke tengah masyarakat. Beberapa informan kembali memberi catatan bahwa penggunaan lagu, tari maupun musik tetap harus memperhatikan ketentuan dalam aturan syariat Islam, misalnya pakaian penari yang harus menutup aurat.

Beberapa informan berpandangan lebih jauh lagi, bahwa tradisi atau kebudayaan lokal merupakan warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai luhur dan sakral. Menjaga kelestarian budaya tersebut adalah tugas generasi masa kini. Budaya tidak hanya dipandang sebatas sebagai media syiar agama, lebih dari itu budaya adalah pesan moral dan pesan luhur agama itu sendiri. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Muhammad Sabir, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MAN 2 polman (wawancara, 07/09/2020).

“Menurut saya meletakkan kebudayaan lokal dalam keberagamaan masyarakat di Indonesia, khususnya di Mandar bahwa kebudayaan lokal tersebut mengandung nilai-nilai luhur agama. Kebudayaan lokal bukan hanya sebagai media syiar agama, tapi melalui kebudayaan lokal Islam ‘membumi’ di Indonesia, khususnya di Tanah Mandar. Melalui kebudayaan pula, Islam kemudian diterima sebagai identitas sosial masyarakat, seperti yang terjadi di Mandar.”

Menyikapi praktik-praktik keberagamaan masyarakat yang berbau syirik, khurafat maupun bid'ah, informan tidak memungkirinya adanya praktik yang menjurus ke arah tersebut. Misalnya praktik meminta-minta di kuburan yang dipandang keramat atau paradigma keberagamaan masyarakat yang meletakkan tradisi seolah sebagai syariat yang wajib dilaksanakan. Menyikapi hal tersebut, menurut informan perlu dilakukan pendekatan persuasif dengan memberikan pemahaman yang benar, guna meluruskan kesalahpahaman masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Andi Saleh, guru PAI di SMAN Campalagian (wawancara, 08/09/2020).

“Secara umum tradisi keislaman yang dijalankan oleh masyarakat sebenarnya sudah cukup baik, meski tak bisa dipungkiri ada kesalahpahaman dan praktik yang sedikit menyimpang. Menyikapi hal tersebut bukan berarti harus menghilangkan tradisi. Misalnya kebiasaan sebagian masyarakat yang “meminta-minta” di kuburan, seperti kuburan Imam Lapeo. Hal yang salah, bukan pada tradisi ziarah kuburnya, tapi praktik yang mulai menyimpang karena pemahaman yang salah. Karena itu, perlu

diberikan pemahaman yang benar tentang seperti apa ziarah kubur dalam Islam. Demikian pula misalnya dalam menyikapi praktik keberagamaan masyarakat lainnya yang mulai berbau syirik atau khurafat, pendekatan persuasif yang lemah lembut harus lebih diutamakan bukan dengan bertindak kekerasan.”

Beberapa informan menyatakan merasa penting untuk menjelaskan secara lugas kepada siswa mengenai pentingnya memberikan penghargaan dan menjaga kelestarian tradisi sebagai warisan leluhur. Pendekatan yang dilakukan oleh beberapa guru PAI adalah dengan menekankan pentingnya kebudayaan sebagai media syiar agama yang membuat agama (Islam) dapat hidup dan mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat. Beberapa informan juga mengungkapkan, bahwa mereka sering menekankan kepada siswa, bahwa dengan melestarikan kebudayaan berarti bentuk penghormatan dan penghargaan kepada leluhur serta menjaga identitas keislaman yang telah diwariskan oleh para ulama terdahulu.

KESIMPULAN

Umumnya guru PAI masih menunjukkan kecenderungan literasi yang rendah, termasuk literasi seputar moderasi beragama. Mengakses informasi keagamaan melalui konten ceramah di internet dan nama Ustaz Adi Hidayat yang paling sering disebut sebagai orang yang paling sering didengar/ditonton ceramahnya serta diidolakan oleh umumnya guru. PAI. Terdapat dua “kasus ekstrem” yang bersifat bad practice dan best practice terkait

moderasi beragama di kalangan guru PAI di Polman. Kasus yang pertama adalah seorang guru mata pelajaran Al-Qur'an-Hadis yang mundur sebagai ASN, setelah sebelumnya dimutasi dan dilakukan pembinaan karena sikapnya yang menolak untuk bersikap hormat kepada bendera. Sebaliknya best practice moderasi beragama ditunjukkan oleh salah seorang guru MA non ASN yang aktif dalam kegiatan-kegiatan lintas iman dan pembelaan terhadap kelompok minoritas. Pola pemahaman moderasi beragama guru PAI yang dieksplorasi melalui tiga indikator, yaitu pemahaman tentang keragaman agama dan kelompok minoritas, relasi agama dan negara, serta perspektif tentang hubungan agama dan kebudayaan. Secara umum guru PAI yang diwawancarai menunjukkan pemahaman keagamaan yang cukup moderat utamanya dalam hal relasi agama dan negara serta hubungan agama dan kebudayaan. Minimnya atau bahkan tidak adanya pengalaman interaksi dalam bentuk perkawanan dengan penganut agama lain atau mungkin juga dilatari pemahaman keagamaan tertentu, membuat sebagian informan terkesan menunjukkan pemahaman yang agak eksklusif dalam hal relasi dalam keragaman agama. Oleh karena itu program moderasi beragama perlu menyasar lebih jauh kepada guru PAI, melalui program penguatan wawasan moderasi beragama. Program tersebut bisa melalui program workshop, diklat, hingga penerbitan buku ajar PAI yang bermuatan moderasi beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, D. A. G. (2017). Keragaman Keberagamaan (Sebuah Kodrati Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila). *Sejarah Dan Budaya*, 11(2), 151–159.
- Arif, S. (2010). *Deradikalisasi Islam: Paradigma dan Strategi Islam Kultural*. Koekoesan.
- Dja'far, A. M. (2018). *Intoleransi: Memahami Kebencian dan Kekerasan Atas Nama Agama*. Elex Media komputindo.
- Faisal, S. (2007). *Format-format Penelitian Sosial*. Rajagrafindo Persada.
- Hasan, N., Ichwan, M. N., Mibtadin, Muhtarom, A., Sandiah, F. A., & Saleh, A. Q. (2019). *Tren Pemikiran Islam di Indonesia Pasca Orde Baru*. Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen

Organisasi.

- Idham. (2007). Sosialisasi Nilai Budaya Mandar (Studi Kasus pada Generasi Muda Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat). *Al-Qalam*, 13(2), 115–131.
- Jainuri, A. (2016). *Radikalisme dan Terorisme: A kar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. intrans Publishing.
- Jakarta, P. U. (2018). *Pelita yang Meredup: Potret Keberagamaan Guru di Indonesia*.
- Kasniyah, N. (2012). *Tahapan Menentukan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. Ombak.
- Kementerian Agama RI. (2019a). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2019b). *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Mappangara, S., & Abbas, I. (2003). *Sejarah Islam di Sulawesi Selatan*. Lamacca Press.
- Misrawi, Z. (2010). *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi Keislaman dan Kebangsaan*. Kompas Media Publisher.
- Munip, A. (2012). Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah. *Pendidikan Islam*, I(2), 159–181. <https://doi.org/10.14421/jpi.2012.12.159-181>
- Musaddad, A. (2018). *Annangguru dalam perubahan sosial di Mandar*. Gerbang Virtual.
- Nasution, H. (1995). *Islam Rasional*. Mizan.
- Nata, A. (2001). *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*. Rajawali Press.
- Osman, M. F. (2006). *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan*. Paramadina.
- Purwanto, Y., Qawa'id, Ma'rifataini, L., & Fauzi, R. (2019). *nternalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*. *Edukasi*, 17(2), 110–124.
- Qodir, Z. (2014). *Radikalisme Agama di Indnnesia*. Pustaka Pelajar.
- Qustulani, M., Irfani, F., Fariduddin, E. I., & Suhendra, A. (2019). *Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyelamatkan Umat dan Negeri dari Bahaya Hoax*. PSP Nusantara Press.
- Rahmat, M. I. (2005). *Arus Baru islam Radikal*. Erlangga.
- Rokhmad, A. (2012). Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. *Walisongo*, 20(1), 79–114.
- Sabara. (2020). Paradigma dan Implementasi Moderasi Beragama dalam Konteks Kebangsaan. *Mimikri*, 6(1), 17–35.
- Sumbulah, U. (2010). *Islam Radikal dan Pluralisme Agama*. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan Actualization of Religion Moderation in Education Institutions. *Bimas Islam*, 12(1), 323–348.
- Walzer, M. (1997). *On Toleration*. Yale University Press.
- Widyaningsih, R., Samiyem, & Kuntarto. (2017). Kerentanan radikalisme agama di kalangan anak muda. *Rekayasa Sosial Dan Pengembangan Perdesaan*, 6, 1553–1562.